

**EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN)
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU
DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Desa Lalowatu Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan)**

IRMAYANTI

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

PKH merupakan jenis bantuan sosial tunai bersyarat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial RI yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). PKH membuka akses keluarga miskin terutama bagi ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia dan penyandang disabilitas berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Bantuan Sosial PKH Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, dan juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang Bantuan sosial PKH dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lalowatu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis ekonomis, menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yakni berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH Di Desa Lalowatu dapat dikatakan efektif. Dikatakan sudah efektif karena dari 5 indikator yakni pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata sudah berjalan dengan semestinya. Terdapat beberapa perubahan kesejahteraan yang dirasakan oleh KPM PKH di Desa Lalowatu meskipun belum secara keseluruhan. Jika ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam yakni jaminan sosial sebagai tanggung jawab negara kemudian konsep kerja keras dan tidak menggantungkan kepada orang lain belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini disebabkan karena masih terdapat KPM yang tidak ingin melepas dan merasa keberatan apabila bantuan PKH dari pemerintah diberhentikan.

Kata Kunci: PKH, Efektivitas, Kesejahteraan, Perspektif Ekonomi Islam.

1. Pendahuluan

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan juga pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Peraturan menteri sosial tentang program keluarga harapan Nomor 1 tahun 2018 menjadi bukti yakni kesejahteraan begitu penting bagi negara ini sehingga harus diatur dalam sebuah undang-undang agar kesejahteraan yang dimaksudkan dapat tercapai demi kepentingan bersama. Dengan menimbang bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan, selanjutnya bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan (Kementerian Sosial, 2018, p. 1).

Berbicara mengenai kemiskinan, hal yang perlu ditekankan/diperhatikan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu. Mereka yang dianggap mampu baik secara personal maupun institusional, sehingga dapat meminimalisir kemiskinan sosial. Jika golongan kaya ini tidak mempedulikan nasib fakir miskin, maka mereka masuk dalam kategori pendusta *agama sebagaimana firman dalam QS. Al-Ma'un: 1-3.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي
يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ

Terjemahnya: 1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2) Itulah orang yang menghardik anak

yatim 3) dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin (Qur'an kemenag RI, 2019).

Ayat ini, Allah menghadapkan pertanyaan kepada Nabi Muhammad, "Apakah engkau mengetahui orang yang menyangkal agama? Dan apa artinya menjadi orang yang menyangkal agama?" Pertanyaan ini dijawab pada ayat-ayat berikut. Allah lalu menjelaskan bahwa sebagian dari sifat-sifat orang yang menyangkal agama Allah adalah orang-orang yang menolak bahkan sampai membentak anak-anak yatim yang datang kepadanya untuk memohon belas-kasihnya demi kebutuhan hidupnya. Penolakannya itu dinilai sebagai penghinaan dan takabur terhadap anak-anak yatim itu. Ayat ketiga, Allah juga menegaskan lebih lanjut sifat pendusta itu, yaitu dia tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan orang miskin. Bila tidak mau mengajak orang memberi makan dan membantu orang miskin berarti ia tidak melakukannya sama sekali. Berdasarkan keterangan di atas, bila seorang tidak sanggup membantu orang-orang miskin maka hendaklah ia menganjurkan orang lain agar melakukan usaha yang mulia itu. (Qur'an kemenag RI, 2019)

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga miskin diberikan akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya. Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya dibidang kesehatan, dan pendidikan. peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya di bidang kesehatan yakni pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, kewajiban kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan, pemberian gizi dan imunisasi anak balita. Kemudian Di bidang pendidikan, kewajiban peserta PKH terkait

dengan menyekolahkan anak kesekolah dasar dan lanjutan yakni SD hingga SLTP/SMP (Yuliani, 2020)

Desa Lalowatu merupakan salah satu desa yang menjadi sasaran penerima bantuan sosial PKH. Namun, peneliti merasa kehadiran bantuan sosial PKH belum terlaksana dengan semestinya karena ada beberapa keluarga yang dari segi finansial sudah masuk dalam kategori Sejahtera namun masih menerima bantuan PKH sedangkan masih banyak masyarakat/keluarga yang memprihatinkan dan layak dibantu namun justru tidak mendapatkan bantuan tersebut dan ini menjadi masalah yang harus diteliti lebih lanjut.

Data Penduduk Desa Lalowatu, Tahap III Tahun 2022

No.	RT - Dusun	Jumlah KK	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	KPM (Keluarga Penerima Manfaat)
1.	Dusun 1, RT 1	21	18	0
2.	Dusun 1, RT 2	19	16	3
3.	Dusun 2, RT 1	20	19	5
4.	Dusun 2, RT 2	19	17	1
5.	Dusun 3, RT 1	18	16	4
6.	Dusun 3, RT 2	19	16	4
7.	Dusun 4, RT 1	17	15	2
8.	Dusun 4, RT 2	24	24	4
	Total	157	141	23

Sumber: Kepala Desa Lalowatu

Dari table diatas, jumlah KK di Desa Lalowatu tahun 2022 berjumlah 157 KK dan ada sebanyak 141 KK yang masuk kategori keluarga Pra Sejahtera, ini menandakan bahwa masih banyak sekali keluarga yang kurang mampu di desa Lalowatu. Dari 157 KK, hanya sekitar 16 Keluarga yang dikategorikan mampu atau Sejahtera. Sehingga perlu adanya perhatian dari pihak pemerintah.

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis, memberikan gambaran kepada penulis mengenai Efektivitas Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) sehingga penulis mencoba memahami, mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut ke dalam penelitian yang berjudul "*Efektivitas Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari*

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Lalowatu Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan)".

2. Landasan Teori Efektivitas

Menurut Sutrisno dalam (Rahmah Muin, 2020, pp. 131–132), Efektivitas dari suatu program maupun kegiatan yang dilaksanakan dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan realisasi program. Adapun indikator Efektivitas menurut Sutrisno adalah:

- 1) Pemahaman Program
- 2) Ketepatan sasaran
- 3) Ketepatan waktu
- 4) Tercapainya tujuan
- 5) Perubahan nyata

Program Keluarga Harapan

Menurut Andika 2021 Program Keluarga Harapan adalah upaya mempercepat pencapaian target millennium Development Goals. Adapun tujuan PKH sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan yakni pada pasal 2 adalah:

- 1) Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Menurut perspektif ekonomi Islam, pemberian jaminan sosial dari pemerintah berupa bantuan sosial PKH haruslah berlandaskan pada nilai nilai dasar ekonomi Islam yakni:

- 1) Keadilan

- 2) Tanggung jawab
- 3) Takaful (jaminan sosial)

Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Bkkbn dalam (BAPPENAS, 2015, pp. 10–13), keluarga dengan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga yakni dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan yakni KPS, KS I, KS II, KS III, KS III Plus. adapun indikator Kesejahteraan menurut Bkkbn yakni:

- 1) Perubahan konsumsi sehari-hari.
- 2) Meringankan biaya pendidikan anak sekolah.
- 3) Perubahan kondisi rumah menjadi lebih layak huni.
- 4) Perubahan dalam pembelian baju dalam satu tahun.
- 5) Mencapai batas minimal konsumsi daging ikan/telur.
- 6) Peningkatan pendapatan keluarga.
- 7) Mulai menyisihkan uang untuk menabung.
- 8) Kebersamaan di dalam keluarga lebih hangat.

Kesejahteraan menurut perspektif ekonomi islam yakni menggunakan teori/indikator Imam Al-Ghazali dalam (Sandi, 2018, pp. 39–40) yang mengatakan bahwa kunci dari pemeliharaan kelima tujuan dasar manusia meliputi:

- 1) Prioritas utama yakni Kebutuhan pokok (dthururiyat)
- 2) Prioritas kedua yakni Kesenangan atau kenyamanan (hajiyat)
- 3) Prioritas ketiga yakni Kemewahan (tahsiniyat)

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian deskriptif yang berfungsi untuk menggambarkan, meringkas berbagai keadaan serta mengangkat fenomena ke permukaan sebagai suatu ciri karakter, model, atau gambaran mengenai status, fenomena maupun kondisi tertentu. Penelitian ini dilakukan di Desa Lalowatu Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Bantuan Sosial PKH (Program

Keluarga Harapan) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis Ekonomis.

Adapun sumber data yang penulis gunakan yaitu menggunakan dua jenis sumber data, yakni:

1) Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh sumber pertama baik perseroan atau individu contohnya wawancara maupun hasil pengisian kuesioner yang sering dilakukan peneliti (Umar, 2014)

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pendamping PKH sebanyak 1 orang, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebanyak 15 orang dan Masyarakat Desa Lalowatu (kategori pra sejahterah) sebanyak 5 orang.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder berisi informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, seperti buku, catatan, situs web, internet, majalah, dokumentasi, data sensus dan lainnya (Tungga et al., 2014). Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah artikel, jurnal ilmiah, buku, internet, peraturan perundang-undangan, peserta penerima bantuan sosial PKH, data-data terkait PKH (Program Keluarga Harapan) serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam memperoleh data-dara yang diperlukan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Yuliani, 2020).

Keabsahan data dapat dicapai yakni dengan menggunakan proses pengumpulan

data yang tepat. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang di kemukakan oleh (Djaman Satori, 2014). Teknik ini dilakukan untuk mengecek kebenaran dan keakuratan data penelitian.

4. Pembahasan

Program Keluarga Harapan di Desa Lalowatu

a. Sejarah PKH di Desa Lalowatu

PKH (Program Keluarga harapan) di Desa Lalowatu mulai dilaksanakan pada tahun 2013 yang merupakan salah satu sasaran dari Pelaksanaan PKH Di tingkat Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian turun ke Kecamatan dan Desa sebagai sasaran program, Karena di desa-desa itulah adanya KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Berdasarkan dari hasil penjelasan Kepala Desa Lalowatu mengatakan semenjak awal pelaksanaan PKH mulai dari masih sedikit hingga sekarang ini sudah mencapai 31 KPM yang terbagi dari masing-masing Dusun dan RT di Desa Lalowatu.

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program yang dikeluarkan dari kementerian sosial dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan (jangka panjang), sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah mengurangi beban rumah tangga miskin serta mempermudah akses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

b. Pelaksanaan PKH di Desa Lalowatu

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH Desa Lalowatu jumlah penerima manfaat tahap IV tahun 2022 berjumlah 31 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan 3 komponen yakni kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan Kategori ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah SD, anak sekolah SMP, anak sekolah SMA, Lansia dan penyandang disabilitas berat.

Hasil wawancara dengan Ibu Hasna yang merupakan Pendamping PKH Desa Lalowatu mengemukakan bahwa jumlah penerima manfaat cenderung mengalami peningkatan. Menurut beliau, jumlah KPM

PKH mengalami peningkatan yang sekarang ini berjumlah 31 KPM dibandingkan dengan jumlah KPM di tahun tahun sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau:

“Untuk perubahan perubahan KPM tentunya ada, hanya saja semakin kesini jumlah penerima manfaat di Desa Lalowatu mengalami kenaikan yakni di tahap IV tahun 2023 ini sudah sebanyak 31 KPM, namun untuk data paten tiap tahun itu tidak bisa dipastikan karena setiap tahap itu beda beda jumlah penerima”. (Hasna, 21 Februari 2023)

Terjadinya kenaikan jumlah Penerima Manfaat ini dikarenakan penambahan KPM yang diusulkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah pusat yang mengelolah dan mengatur tentang pemberian Bantuan Sosial. Hal ini disebabkan masih banyaknya kategori keluarga pra sejahterah di Desa Lalowatu, sehingga pemerintah Desa berupaya agar masyarakatnya yang layak dapat memperoleh dan menerima bantuan PKH.

Gambar 1. Alur Pendaftaran Fakir Miskin di DTKS



Sumber: Dinsos Kabupaten Konawe Selatan

Setelah melakukan pendaftaran fakir miskin pada data terpadu kesejahteraan sosial, selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi data dan validitas DTKS calon penerima bantuan sosial PKH.

Gambar 2. Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DTKS Penerima bantuan PKH



Sumber: Dinsos Kabupaten Konawe Selatan

Jumlah penerima bantuan PKH di Desa Lalowatu saat ini yakni 31 KPM dengan beberapa Komponen yakni Pendidikan, Balita (Kesehatan) dan Lansia.

Di Lalowatu, sudah ada beberapa KPM yang telah keluar dan berhenti menerima PKH karena sudah masuk kategori sejahterah dan tidak memenuhi komponen-komponen penerima manfaat. Sehingga secara otomatis keluarga tersebut sudah dinyatakan mampu/layak dan akan diberhentikan bantuan sosial PKH nya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Hasna selaku pendamping PKH:

“Ituhari kan kami sempat jalan rumah ke rumah untuk verifikasi Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) ternyata ada yang sudah tidak layak menerima, dimana penerima manfaat itu sudah tidak masuk kategori dalam keluarga miskin dan dia sudah sejahterah jadi secara otomatis dia mengundurkan diri (Graduasi

mandiri) tanpa paksaan dari siapapun yang kemudian nantinya akan disetujui oleh pendamping dan Kepala Desa”. (Hasna, wawancara 21 Februari 2023)

Gambar 3. Penjelasan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial



Sumber: Dinsos Kabupaten Konawe Selatan

Namun yang menjadi kendala KPM di Desa Lalowatu adalah minimnya pengetahuan tentang program bantuan dan penggunaan dana serta kurangnya keterbukaan mengenai kondisi kesejahteraannya. Sehingga ini menjadi kendala yang harus di selesaikan dengan cara terus memberikan edukasi terkait dengan tujuan dari pemberian bantuan sosial. sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu pendamping bahwa:

“Untuk kedepannya sebagai penerima PKH itu alangka baiknya apabila dia sudah layak atau sudah mampu segera mengundurkan diri secara sukarela itu harapan kami kedepannya, jangan sudah mapan tapi ndada yang mau terbuka. Kemudian kendalanya disini mereka belum paham mengenai penggunaan dana yang sebetulnya walaupun ada beberapa yang sudah paham, sehingga mereka sama ratakan semua jenis bantuan padahal ada banyak jenis bantuan seperti BLT-BBM, BPNT, BLT. Kalau PKH itu kan khusus untuk

keluarga miskin yang mencakup komponen-komponennya seperti ibu hamil, balita, lansia, anak sekolah dan disabilitas”. (Hasna, wawancara 21 Februari 2023)

Untuk bisa menjadi KPM PKH, langkah awal yang dilakukan yakni pengusulan dari Desa kemudian dari Desa akan dipilah kembali siapa yang layak untuk di proses datanya. Ibu Hasna selaku Pendamping PKH Desa Lalowatu menjelaskan alur mulai dari pengusulan hingga resmi menjadi KPM PKH:

“Alur Mekanisme calon penerima manfaat yakni keluarga miskin mendaftarkan diri ke Kepala Desa dengan membawa KTP dan KK, selanjutnya Kepala Desa/Lurah menyampaikan data pendaftaran ke Bupati/Walikota melalui proses Muskel/des. Kemudian Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran rumah tangga lalu penetapan Data terpadu kesejahteraan (DTKS) dilanjutkan kegiatan mencocokkan Data calon KPM yang memenuhi kriteria oleh direktorat jaminan sosial keluarga”. (Hasna, wawancara 21 Februari 2023)

Proses pengusulan hingga resmi menjadi anggota PKH memang terbilang sangat sulit dan membutuhkan waktu yang panjang, tidak semua nama yang diusulkan oleh Kepala Desa dapat lolos sampai ke tahap akhir, karena setelah nama diusulkan masih terdapat beberapa tahap yang akan dilakukan sebelum nama KPM resmi menjadi penerima PKH.

Selain menerima bantuan sosial PKH, Berdasarkan observasi di lapangan, beberapa keluarga penerima manfaat PKH juga mendapatkan bantuan paket lainnya yang berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan Program Indonesia pintar (PIP). Ibu Nianti selaku Ketua Kelompok PKH Desa Lalowatu mengemukakan:

“Semenjak dilaksanakan PKH di Desa Lalowatu dari tahun 2013 terdapat beberapa perubahan tempat pencairan dana PKH diantaranya, pada awal pencairan PKH itu di lakukan melalui kantor pos dan belum menggunakan kartu hanya sudah dikasih buku rekening, kemudian lagi pada tahapan selanjutnya kami diarahkan untuk mencairkan di balai serba guna yakni di Kelurahan Tinanggea sekaligus pembagian kartu KKS, setelah itu sempat lagi di suruh cairkan di salah satu Link yang ada di Tinananggea kemudian karena sudah ada Agen Mandiri Link dikampung (E-Waroeng) dan lebih dekat juga jadi pencairan sempat juga dilakukan disana tapi sekarang ini ndatau kenapa pencairan PKH dilaksanakan di Kantor pos kembali”. (Nianti, 16 Februari 2023)

Gambar 4. Mekanisme seleksi calon penerima bansos PKH



Sumber: Dinsos Kabupaten Konawe Selatan

Gambar 5. Kartu Keluarga Sejahterah (KKS) Kartu Keluarga Sejahterah



Sumber: Ibu Ninis (KPM PK)

Dengan adanya ATM atau KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) ini KPM merasa lebih nyaman dan lebih memudahkan proses pencairan ditambah dengan adanya ketua kelompok yang membantu proses pencairan bantuan agar terkontrol dengan baik. Tenaga dari ketua kelompok sangat dibutuhkan saat pencairan maupun saat ada pertemuan dengan pendamping.

Efektivitas Bantuan Sosial PKH Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lalowatu

Kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam distribusi kekayaan yang dimiliki oleh negara. Dimana peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah dengan menggunakan prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam prinsip ini adalah ketika pemerintah menjadikan simpul terlemah masyarakat sebagai basis penyusunan ekonomi. Peran kesejahteraan berarti pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan secara materiil maupun spiritual. Pemerintah pun akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir angka kemiskinan baik kemiskinan materiil, kemiskinan spiritual, dan terlebih lagi kemiskinan absolut (Prichatin, 2019, p. 64)

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan demi tercapainya kesejahteraan adalah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni sejak tahun 2007. Dimana PKH merupakan Bantuan Sosial bersyarat

yang diberikan kepada masyarakat yang terdaftar di DTKS (Data Kesejahteraan Sosial). Dalam komponen yang terdapat dalam program keluarga harapan ini semakin berkembang yang pada awalnya meliputi dua komponen yakni komponen pendidikan, kesehatan ibu hamil dan anak balita. Hal ini meliputi anak yang berusia 6-21 tahun yang belum selesai melaksanakan pendidikannya yakni pada usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/kejuruan, dan kesehatan bagi anak. Kemudian pada tahun 2016 semakin berkembang menjadi empat komponen yakni komponen pendidikan, kesehatan, disabilitas dan komponen kesejahteraan lanjut usia.

Peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat terus dilakukan dengan berbagai upaya salah satunya dengan pemberian bantuan sosial PKH, karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Nabi telah bersabda: “Siapa yang menaatiku maka dia telah menaati Allah dan siapa yang durhaka kepadaku maka sesungguhnya dia telah durhaka kepada Allah. Siapa yang menaati pemerintah maka dia telah mentaatiku dan siapa yang mendurhakai pemerintah maka dia telah mendurhakaiku.” (Marjan, 2021, p. 344) hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk mentaati pemerintah yang telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Pada pelaksanaannya, pemberian bantuan sosial PKH di Desa Lalowatu Kecamatan Tinanggea dilaksanakan sejak tahun 2013 yang pada waktu itu masih dibawah kepemimpinan Ibu Siti Lasa dan mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Di Lalowatu terdapat 1 pendamping PKH yakni Ibu Hasna SE serta 1 orang ketua Kelompok yakni Ibu Nianti.

Pendamping PKH memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman berupa sosialisasi kepada KPM

PKH, adapun undang-undang yang secara resmi mengakui dan mengatur keberadaan pendamping yakni Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana pada pasal 1 ayat 14 menerangkan bahwa pendamping adalah pekerjaan sosial yang memiliki kompensasi di bidangnya. (Mardi & Abdul Rahman, 2022, p. 23)

A. Capaian Indikator Efektivitas Bantuan Sosial PKH di Desa Lalowatu

Untuk dapat mengetahui Keefektifitasan pemberian Bantuan Sosial PKH di Desa Lalowatu, penulis menggunakan 5 Indikator yang mengacu pada penelitian Sutrisno (dalam Rahmah Muin, 2020, pp. 132–133) untuk mengukur apakah pemberian bantuan telah berjalan dengan efektif atau justru belum efektif. Adapun indikator pengukuran efektivitas yakni Pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan salah satu indikator dalam mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program. Pemahaman program yang dimaksud disini adalah sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang bantuan sosial PKH.

Di Desa Lalowatu, menurut hasil wawancara dengan salah satu KPM mengemukakan bahwa kegiatan sosialisasi rutin dilaksanakan oleh pendamping di setiap bulannya. Ibu Ninis selaku KPM PKH mengemukakan bahwa:

“Kalau dulu itu sebelum Ibu hasna, waktu masih pak Ma’ruf yang jadi pendamping di sini setiap bulan itu selalu diadakan pertemuan bersama dengan anggota”. (Ninis, 16 Februari 2023)

Pada pencairan tahap IV ini, terjadi pergantian Pendamping PKH khususnya di Desa Lalowatu, Pendamping PKH yang baru

mengatakan bahwa kedepannya akan dilaksanakan rutin kegiatan sosialisasi kepada anggota agar mereka bisa memahami penggunaan dana PKH. Ibu Hasna selaku Pendamping PKH menuturkan bahwa:

“Karena saya juga masih baru ditetapkan jadi pendamping di sini dek, jadi kedepannya InsyaAllah kita akan merutinkan pertemuan dengan anggota baik itu di balai desa ataupun nanti di rumah ketua kelompok atau di rumah anggota yang lain yang jelasnya kita gilir bukan di satu rumah saja”. (Hasna, 21 Februari 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Sejalan dengan hasil wawancara yang di sampaikan oleh Ibu Ratna dan Ibu Ninis, seluruh KPM yang menjadi Responden sudah mengetahui mengenai tujuan dari Program Keluarga Harapan sehingga indikator pemahaman program sudah berjalan dengan baik, karena beberapa penerima manfaat sudah lebih paham mengenai apa itu PKH dan penggunaan dananya. Apalagi dengan kegiatan rutin per bulan yang dilakukan oleh pendamping bisa lebih meningkatkan pemahaman anggota terkait dengan hak dan kewajibannya. Sehingga dengan demikian, indikator pemahaman program ini dapat dikatakan berjalan efektif di Desa Lalowatu.

Diharapkan kedepannya semua KPM bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan dana PKH sesuai dengan fungsi dan tujuan dana bantuan tersebut. Sebagaimana dalam peneltian (Domri et al., n.d., p. 2) yang juga menekankan agar KPM lebih bijak dalam menunaikan kewajibannya yakni pada bidang kesehatan dan pendidikan dimana kewajiban dalam bidang pendidikan meliputi pemeriksaan kandungan ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita serta pemeriksaan kesehatan, sedangkan di bidang pendidikan yakni kewajiban KPM menyekolahkan anak mulai dari SD-SMA.

2. Ketepatan Sasaran

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu program bantuan tentunya yang menjadi penerima haruslah tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran program keluarga harapan adalah peserta yang telah dinyatakan lolos sebagai penerima manfaat dan memenuhi kriteria serta komponen-komponen penerima bantuan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan ibu Hasna selaku Pendamping PKH di Desa Lalowatu yang mengatakan bahwa:

“Untuk penerima PKH di Desa Lalowatu itu dek Alhamdulillah sudah tepat sasaran lah dan sudah memenuhi kategori dalam penerima PKH”. (Hasna, wawancara 21 Februari 2023)

Selain Ibu Andri Eka, penulis juga mewawancarai penerima manfaat yang lain yakni Ibu Jumarni mengenai pekerjaan sehari-hari. Ibu Jumarni menjelaskan bahwa:

“Tidak ada dek, hanya mengharap sama kepala rumah tangga saja mencari. Karena saya sibuk mengurus anak dan balita jadi kebanyakan tinggal dirumah saja”. (Jumarni, 15 Februari 2023)

Sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Andri Eka dan Ibu Jumarni, semua KPM yang menjadi responden rata-rata berprofesi sebagai Ibu rumah tangga dan sambil membantu suami di kebun, selain itu beberapa KPM mengaku pekerjaannya tidak menentu.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama berada di lokasi penelitian telah sesuai dengan fakta yang terjadi sehingga dapat disimpulkan bahwa Mengenai ketepatan sasaran keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Lalowatu sudah tepat sasaran sehingga indikator ini dapat dikatakan efektif. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Amelia, 2021, p. 16) yang memaparkan bahwa sasaran dari penerima manfaat adalah keluarga yang masuk dalam kategori

keluarga miskin dengan syarat memiliki komponen pendidikan dan kesehatan.

3. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu pencairan dana PKH sangat dibutuhkan karena ini juga sebagai indikator apakah pemberian dana PKH sudah efektif atau tidak. Hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pusat untuk memberikan hak dari masing masing KPM dengan tepat waktu.

Adapun mengenai waktu penyaluran bantuan sosial PKH di Desa Lalowatu terungkap dari hasil wawancara dengan Pendamping PKH yakni Ibu Hasna pada pesan WhatsApp tanggal 03 Maret 2023 yang mengemukakan bahwa:

“Kalau untuk penyalurannya itu dek 4 kali dalam setahun sedangkan mengenai tanggalnya tidak bisa dipastikan pula”. (Hasna, wawancara 03 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH dapat diketahui bahwa penyaluran PKH dilakukan per tiga bulan sekali jadi dalam setahun terdapat IV tahap penyaluran. Ibu Hasna menambahkan bahwa:

“Kalau yang dulu itu pencairan dilakukan bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Kalau yang terbarunya itu penyaluran dilaksanakan bulan Februari, Mei, Agustus dan November”. (Hasna, wawancara 03 Maret 2023)

Selain hasil wawancara dengan Ibu Hasna selaku pendamping, peneliti juga mewawancarai Ibu Ninis selaku penerima manfaat, beliau mengatakan bahwa:

“tepat waktuji kita terima itu setiap 3 bulan tapi tidak menentu tanggalnya”. (Ninis, wawancara 28 Februari 2023)

Untuk penyaluran dana PKH sudah tepat waktu hanya saja untuk tanggal pastinya itu tidak menentu tapi KPM terima sebanyak 4 kali setiap tahun. Ibu Yeni juga membenarkan dengan mengatakan bahwa:

“Iyee setiap per tiga bulan kita terima, kalau tanggal pastinya itu tidak menentu”. (Yeni, 16 Februari 2023)

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Yeni, Ibu Ninis dan Ibu Hasna hal yang sama disampaikan oleh responden yang peneliti wawancarai, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pencairan dana PKH untuk anggota atau KPM telah berjalan tepat waktu dan terealisasi dengan baik walaupun untuk tanggalnya tidak menentu tetapi pencairan selalu dilakukan per tiga bulan.

Maka indikator ketepatan waktu sudah berjalan dengan efektif. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ekardo et al., 2014, p. 7) yang mengatakan dalam penelitiannya bahwa jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan PKH disesuaikan dengan kondisi pada tahun berjalan. Dalam pencairan dana bantuan PKH para KPM tidak mendapatkan informasi dari Pendamping tentang jadwal dan tempat pencairan dana bantuan PKH. Hal tersebut berbanding terbalik dengan proses pencairan dana PKH di Desa Lalowatu, dimana Pendamping akan menginformasikan mengenai waktu dan tempat pencairan dana bantuan PKH bahkan pendamping di Desa Lalowatu turut serta hadir ketika proses pencairan dilakukan sampai selesai.

4. Tercapainya tujuan

Suatu program dapat dikatakan berhasil apabila tujuan dari suatu program tercapai dengan semestinya. Sesuai dengan pernyataan Ibu Hasna selaku pendamping PKH Desa Lalowatu Kecamatan Tinanggea mengatakan bahwa:

“Tujuan pemberian bantuan PKH itu untuk mengurangi beban kemiskinan di Desa, hanya terkendala saja mereka juga masih ada yang kurang paham penggunaan dana nya seperti

apa”. (Hasna, wawancara 21 Februari 2023)

Jadi menurut Ibu Hasna pelaksanaan PKH di Desa Lalowatu sudah berjalan dengan baik, beliau juga menambahkan bahwa:

“Meskipun jumlah KPM di Desa Lalowatu mengalami kenaikan yang dulunya 23 KPM dan Sekarang 31 KPM, tetapi sudah ada juga yang keluar (Graduasi mandiri) sebanyak 3 KPM”. (Hasna, wawancara 21 Februari 2023)

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada Ibu pendamping apakah dengan adanya program bantuan sosial PKH, KPM menjadi lebih peduli tentang kesehatan dan pendidikan, Ibu Hasna menjelaskan dan mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah kalau selama dengan adanya bantuan PKH ini, bagi KPM mereka telah peduli dengan kesehatan ibu hamil, balita dan pendidikannya dan kami ini juga ikuti dan selalu pantau sehingga mereka antusias untuk ikut ke posyandu dan fasilitas sekolah”. (Hasna, wawancara 21 Februari 2023)

Apa yang disampaikan oleh Ibu Hasna sesuai dengan pengamatan yang dilihat saat melakukan penelitian. Hal ini diperkuat dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Hasnia yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah setelah cair dana PKH bisa saya gunakan untuk beli baju anak sekolah, kebutuhan beli beras, kalau ada sisanya ma kita belikanmi obat”. (Hasnia, wawancara 16 Februari 2023)

Besaran bantuan yang diterima oleh KPM di setiap tahunnya dapat mengalami perbedaan dikarenakan adanya perubahan serta perkembangan kebijakan PKH (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020, p. 5). Mengenai jumlah bantuan yang diterima KPM di Desa Lalowatu, setiap

KPM menerima dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan komponen-komponen yang tercantum di Kartu Keluarga. Namun, KPM merasa sangat terbantu dan bersyukur karena sudah berkesempatan mendapat bantuan PKH, walaupun jumlah dana yang diterima berbeda beda tapi mereka sangat bersyukur karena merasa sudah dibantu setidaknya untuk mengurangi sedikit beban keluarga. sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Nianti bahwa:

“Kalau untuk saya dek sudah Alhamdulillah, karena setelah terima bantuan ini bisa membantu perekonomian terutama untuk pendidikan anak sekolah tidak seperti dulu sebelum terima PKH, sekarang kita lebih peduli tentang kesehatan dan pendidikan anak”.
(Nianti, wawancara 16 Februari 2023)

Table 5.
Komponen PKH dan Jumlah Bantuan

No	Komponen	Nominal Bantuan
1.	Ibu hamil	Rp. 750.000
2.	Balita	Rp. 750.000
3.	Anak SD	Rp. 225.000
4.	Anak SMP	Rp. 375.000
5.	Anak SMA	Rp. 500.000
6.	Lansia	Rp. 600.000
7.	Disabilitas	Rp. 600.000

Sumber: Pendamping PKH Desa Lalowatu

Hasil penelitian cukup Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Utomo et al., 2014, p. 31) yang menjelaskan mengenai tujuan umum dan khusus pemberian bantuan sosial PKH yakni tujuan umumnya adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, merubah perilaku RTSM yang relative kurang dalam peningkatan kesejahteraan serta meningkatkan sumber daya manusia. Sedangkan tujuan khusus nya adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan maupun kesehatan khususnya

RTSM, Meningkatkan status kesehatan, gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun yakni pada RTSM.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dengan mewawancarai KPM dan Pendamping PKH Desa Lalowatu dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian PKH sudah berjalan cukup baik dan bisa dikatakan tercapai karena rata rata KPM menggunakan dana PKH untuk kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Walaupun masih ada beberapa KPM yang belum begitu memahami penggunaan dana PKH yang semestinya. Tetapi di Desa Lalowatu tujuan pemberian PKH dapat dikatakan berjalan dengan efektif karena setelah mewawancarai beberapa KPM rata-rata memberikan jawaban yakni ketika dana PKH cair kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah kebutuhan anak sekolah.

5. Perubahan nyata

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan KPM PKH di Desa Lalowatu indikator perubahan nyata dari KPM belum sepenuhnya bisa meningkatkan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan namun KPM merasa sudah sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya bantuan PKH ini. Mereka merasa dengan adanya bantuan ini bisa membantu mengurangi beban terutama pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Selain itu, bagi ibu yang memiliki tanggungan anak sekolah juga bisa terbantu dan diringankan dalam membiayai kebutuhan pendidikan seperti perlengkapan sekolah dan biaya sehari hari. Ibu Andri Eka mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah ada perubahan, semenjak terima PKH alhamdulillah bisa mengurangi beban keluarga”.

Ibu Juniatin juga menambahkan bahwa:

“Kalau untuk perubahan itu adalah sedikit, karena bisa lebih meringankan biaya pendidikan anak sekolah apalagi kasian

lumayan jauh sekolahnya jadi bisa membantu untuk sehari-harinya”. (Andri Eka, wawancara 15 Februari 2023)

Selain wawancara dengan KPM PKH, peneliti juga mewawancarai dan meminta pendapat kepada Ibu Hasna selaku Pendamping tentang apakah KPM yang menempati rumah batu (permanen) masih tetap berkesempatan mendapat PKH atau tidak, Beliau mengatakan dan menjelaskan bahwa:

“Kalau rumah batu dek, kami tidak melihat rumahnya karena ada kemungkinan rumahnya bagus tapi kondisi ekonominya kurang, bisa jadi rumahnya wow tapi kondisinya lagi kita fikir”. (Hasna, wawancara 21 Februari 2023)

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Andri Eka dan Ibu Juniatin serta tambahan dari Ibu Hasna sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Responden sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk perubahan nyata masih belum bisa dikatakan efektif karena belum bisa meningkatkan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Namun berdasarkan keterangan dari KPM bahwa mereka sudah cukup terbantu dari segi pemenuhan kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan konsumsi keluarga dan pendidikan. hal ini sejalan dengan penelitian (Rahmah Muin, 2020, p. 144) yakni perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat desa Laliko sudah sangat membantu dalam mengurangi beban pengeluaran khususnya biaya kesehatan dan pendidikan, namun masih ada beberapa masyarakat yang merasa masih belum ada peningkatan dalam hal perekonomian.

Jika diukur dari 5 indikator efektivitas diatas, maka penulis berpendapat bahwa Efektivitas bantuan sosial PKH di Desa Lalowatu jika dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan yang sifatnya jangka pendek sudah berjalan dengan efektif tetapi dalam hal pemenuhan tujuan jangka panjang belum

sepenuhnya dapat dikatakan efektif. Penelitian ini cukup sejalan dengan kesimpulan hasil penelitian (Luthfi, 2019, p. 88) yakni target penerima bantuan sosial PKH di Desa Margajaya yakni masyarakat keluarga miskin merasa terbantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan ibu hamil dan balita. Hasil pengamatan peneliti selama dilapangan memang sudah ada beberapa KPM yang menempati rumah yang layak huni (permanen). Namun, tentunya hal tersebut bukanlah tolak ukur sejahterah atau tidak nya KPM sebagaimana yang dikatakan oleh Pendamping PKH bahwa KPM yang menempati rumah batu bukan menjadi tolak ukur kesejahteraan. Saat melakukan penelitian dilapangan, peneliti melihat kondisi perekonomian beberapa masyarakat Desa Lalowatu terutama Penerima PKH memang masih kurang dan layak dibantu.

B. Perubahan Kesejahteraan Yang Dirasakan Oleh Keluarga Penerima Manfaat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009 menerangkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan layak dan tetap mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (Rahman & Mongkito, 2021, p. 266)

Suatu negara dapat dikatakan maju apabila masyarakatnya sejahterah. Sehingga kesejahteraan merupakan tolak ukur bagi suatu masyarakat jika telah berada pada kondisi sejahtera, kesejahteraan dapat diukur dengan kesehatan, kebahagiaan, keadaan ekonomi dan kualitas hidup rakyat (Rahman et al., 2022, p. 39). Maka dari itu pemerintah melakukan berbagai upaya mensejahterahkan masyarakat salah satunya dengan memberikan bantuan sosial. Penelitian diatas sejalan dengan hasil wawancara dengan KPM PKH di Desa Lalowatu mengatakan bahwa mereka

merasakan perubahan kondisi perekonomian setelah menjadi anggota keluarga penerima manfaat PKH.

Perubahan yang paling dominan dirasakan oleh KPM adalah dari segi biaya pendidikan serta ibu yang memiliki balita. Dengan adanya bantuan sosial PKH, KPM merasa sangat terbantu dalam meringankan biaya pendidikan seperti pembelian seragam sekolah, sepatu, buku, transportasi ke sekolah serta pembayaran spp. Selain itu, KPM dengan komponen Ibu yang memiliki balita juga sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan berupa pembelian susu serta makanan yang sehat.

Tabel 6.
Perubahan Tingkat Kesejahteraan KPM

No.	Nama KPM	Perubahan tahapan Kesejahteraan KPM	
		Sebelum menerima PKH	Setelah menerima PKH
1.	Berniati	KPS	KS 1
2.	Suniarti	KPS	KS 1
3.	Risna	KPS	KS I
4.	Ndinahami	KPS	KS I
5.	Nurhani	KPS	KS I
6.	Jumarni	KPS	KS III
7.	Asmiati	KPS	KS II
8.	Fitriani	KPS	KS I
9.	Sarna	KPS	KS I
10.	Sarnia	KPS	KS II
11.	Nianti	KPS	KS II
12.	Sumartin sorumba	KPS	KS I
13.	Astian	KPS	KS II
14.	Jamil	KPS	KS I
15.	Ratnawati	KPS	KS III
16.	Andri eka	KPS	KS II
17.	Nursang	KPS	KS I
18.	Aslia	KPS	KS I
19.	Ninis	KPS	KS II
20.	Asniatin L.	KPS	KS I
21.	Hasnia	KPS	KS II
22.	Siti Nurbaya K.	KPS	KS II
23.	Juniati	KPS	KS I
24.	Maena	KPS	KS II

25.	Sauria	KPS	KS I
26.	Yeni	KPS	KS I
27.	Astapiana	KPS	KS II
28.	Busrawati	KPS	KS I
29.	Harmina	KPS	KS I
30.	Adriansyah	KPS	KS I
31.	Edi	KPS	KS I

Sumber: Wawancara dan Observasi

Beberapa perubahan kesejahteraan keluarga penerima manfaat sebagaimana indikator Keluarga Sejahtera yang di sampaikan oleh BKKBN dan dirasakan oleh KPM PKH yakni sebagai berikut:

a. Perubahan Pada Kebutuhan Dasar Keluarga

Menurut indikator BKKBN yakni kebutuhan dasar keluarga meliputi 6 indikator keluarga sejahtera 1 (KS 1) yang meliputi:

- Konsumsi makanan pokok
- Memiliki pakaian yang berbeda untuk setiap aktivitas
- Rumah yang ditempati mempunyai atap
- Lantai dan dinding yang baik
- Bila keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan
- Pasangan usia subur jika ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.

Bentuk perubahan yang dirasakan oleh KPM PKH dari segi kebutuhan pokok seperti:

1) Perubahan konsumsi sehari-hari

Menurut versi BKKBN keluarga dikatakan sejahtera apabila anggota makan dua kali sehari atau lebih. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan KPM PKH di Desa Lalowatu, mereka makan sebanyak dua kali sehari bahkan bisa sampai tiga kali sehari. Perubahan pola makan ini umumnya dialami oleh kalangan ibu-ibu yang memiliki anak balita dan

sekolah yang menerima manfaat PKH. Dimana hal tersebut diakui oleh para ibu-ibu yang menjadi narasumber peneliti, yakni disampaikan oleh ibu Juniatin yang memiliki komponen anak sekolah yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah deela biasa kita makan tiga kali dalam sehari”. (Juniatin, wawancara 07 Maret 2023)

Ibu Putri selaku Istri dari bapak Adriansyah juga mengatakan bahwa:

“Setelah terima PKH perubahannya Alhamdulillah sudah bisa beli beras, beli ikan, sayur dan lain lainnya. Kemudiannya uangnya juga bisa dipakai belikan susu untuk anak balita”. Putri, wawancara 07 Maret 2023)

Sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Putri dan Ibu Juniatin, rata rata KPM menyampaikan hal yang sama yakni setiap harinya makan sebayak 2 kali bahkan bisa sampai 3 kali. Jadi, pola konsumsi KPM PKH telah sesuai dengan yang dikatakan oleh BKKBN yakni bisa makan minimal dua kali sehari bahkan untuk di Desa Lalowatu rata-rata anggota makan sebanyak tiga kali sehari. Selain itu, perubahan yang bisa dirasakan oleh KPM adalah terpenuhinya kebutuhan sehari hari.

2) Meringankan biaya pendidikan

Salah satu yang menjadi tujuan dari program keluarga harapan adalah peningkatan taraf hidup KPM melalui

akses layanan pendidikan. sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa KPM mengatakan sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH terutama dalam meringankan biaya pendidikan yang tentunya memerlukan biaya cukup banyak terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Nurhani yang memiliki komponen Anak Sekolah bahwa:

“Tentunya sangat membantu sekali dalam meringankan biaya anak sekolah, sangat berbeda dengan sebelum terima PKH karena hanya mengandalkan pendapatan suami. Tapi Alhamdulillah sekarang kita dapat PKH sangat juga kita berterimakasih kepada pemerintah”. (Nurhani, wawancara 07 Maret 2023)

Dengan adanya bantuan PKH ini anggota merasa sangat diringankan dalam mengatasi biaya pendidikan sekolah karena biasanya mereka harus membagi penghasilan yang di dapat untuk kebutuhan makan sehari-hari dan biaya pendidikan anak, kini mereka merasa lebih ringan karena dana dari bantuan PKH dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah baik dari segi perlengkapan maupun biaya sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jumarni yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah setelah terima PKH ini cukup meringankan biaya pendidikan anak dan

kita juga berusaha untuk lebih tingkatan lagi kepedulianta terhadap anak seklah terutama pakaian sekolah, alat alat tulis dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pendidikan”. (Jumarni, wawancara 15 Februari 2023)

Sejalan dengan hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Ibu Jumarni dan Ibu Nurhani hal tersebut sama dengan yang disampaikan oleh seluruh responden (KPM) dalam penelitian ini.

3) Perubahan kondisi rumah

Sebagaimana indikator BKKBN, kondisi rumah yang dimaksud adalah keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. Yaitu layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun kesehatan. Keluarga penerima manfaat PKH di Desa Lalowatu dapat sedikit demi sedikit merubah kondisi rumah menjadi lebih rapi dan layak untuk digunakan sebagai tempat tinggal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden (KPM PKH) yang mengalami perubahan kondisi rumah yaitu Ibu Nurhani dan Ibu putri yang sedikit demi sedikit berubah kondisi rumahnya. Penuturan Ibu Nurhani salah satu KPM yang telah merubah sedikit kondisi rumahnya berkata bahwa:

“Kalau perubahan saya punya rumah dari segi atapnya Alhamdulillah sudah bagus tinggal dindingnya saja tapi kita

syukuri saja karena tidak mungkin kita mau langsung tapi perlahan lahan saja”. (Nurhani, wawancara 07 Maret 2023)

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nurhani, perubahan yang dirasakan adalah atap rumahnya yang dulunya menggunakan Rumbia, sekarang sudah menggunakan Seng. Selanjutnya, Ibu Putri selaku Istri dari bapak Adriansyah menambahkan adanya perubahan kondisi rumah beliau menjelaskan bahwa:

“Alhamdulillah ada, sekarang atap rumah sudah pakai seng, sebelumnya kan pakai rumbia. Sekarang juga Alhamdulillah sudah ada sumur bor walaupun airnya masih agak keruh”. (Putri, wawancara 07 Maret 2023)

Di Desa Lalowatu, ada beberapa KPM PKH yang rumahnya sudah permanen, namun tentunya untuk mengukur sejahtera atau tidaknya masyarakat bukanlah dari kondisi rumahnya, sesuai dengan pernyataan Ibu Hasna selaku Pendamping PKH bahwa mereka dari kementerian sosial memberikan bantuan PKH tidak melihat dari Rumahnya. Karena bisa jadi rumahnya sudah bagus (permanen) tetapi kenyataannya kondisi perekonomian mereka rendah. Saat melakukan penelitian dilapangan, peneliti juga melihat bahwasanya ada KPM yang menempati rumah batu (permanen) tetapi ternyata

rumah tersebut merupakan warisan dan bukan semata-mata di bangun dengan hasil usahanya sendiri.

b. Perubahan pada kebutuhan psikologis

Perubahan Kebutuhan psikologis dalam keluarga BKKBN yakni perubahan dalam melakukan pembelian baju setiap tahunnya, dapat mengkonsumsi daging/ikan/telur sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Berikut hasil wawancara dengan KPM PKH di Desa Lalowatu:

1) Perubahan Pembelian Baju Dalam Satu Tahun

Perubahan pembelian baju dalam setahun, KPM PKH di Desa Lalowatu cenderung tidak terlalu menganggap penting tentang pembelian baju karena mereka merasa masih ada yang lebih layak menjadi prioritas utama terutama pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dari hasil penelitian dan wawancara dengan KPM, mereka bahkan ada yang hanya membeli baju pada saat lebaran saja, kecuali baju untuk anak terutama yang sekolah. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu Siti Nurbaya Konggoasa yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah nanti pada saat mau lebaran saja karena masih ada yang mau dibeli yang lain”. (Siti nurbaya K, wawancara 07 Maret 2023)

Dari hasil penuturan Ibu Siti Nurbaya beliau mengaku hanya membeli baju pada saat dekat lebaran saja karena

menurutnya untuk makan sehari hari saja susah, dan jumlah uang PKH yang diterima juga rendah. Beliau menambahkan:

“.....kalau untuk pakaian sekolah anak setelah cair tentunya sudah jelas pasti kita belikan bahkan dengan kebutuhan yang lain seperti buku, sepatu dan kebutuhan yang lainnya”. (Siti Nurbaya K, wawancara 07 Maret 2023)

Selain itu Ibu Astian juga mengatakan hal yang hampir sama bahwa kadang ia membeli baju hanya pada saat lebaran saja tetapi ada juga kondisi dimana ketika memiliki rezeki yang lebih dia membeli baju baru untuk anaknya. Menurut pengakuan dari ibu Astian mengatakan bahwa:

“Kadang juga kasian begitu kita beli baju nanti mau lebaran, biasa kasian anak ku ini minta beli baju saya janjikan saja saat lebaranpi, ma kecuali pada saat terima PKH dan kebutuhan sudah terpenuhi jadi biasa kalau ke pasar saya liat liatmi juga baju untuk saya sendiri dan anak anak ku”. (Astian, wawancara 07 Maret 2023)

Hasil wawancara dengan Ibu Astian dan Ibu Siti Nurbaya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh responden (KPM PKH) dengan alasan mereka lebih memprioritaskan kebutuhan konsumsi sehari hari dan keperluan pendidikan anak sekolah.

- 2) Mencapai Batas Minimal Konsumsi Daging/Ikan/Telur Satu Minggu Satu kali

Dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi seperti daging/ikan/telur di Desa Lalowatu, Sesuai penuturan Ibu Juniatin yang mengatakan bahwa:

“Kalau ikan Alhamdulillah kalau habis bisami kita beli lagi, kadang beli dua hari sekali”. (Juniatin, wawancara 07 Maret 2023)

Hasil wawancara dengan Ibu Juniatin sejalan dengan apa yang disampaikan oleh seluruh responden. Rata-rata dari hasil wawancara mengatakan bahwa Alhamdulillah setelah diterima menjadi anggota PKH mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan makanan pokok seperti beras dan lauk pauk, kebanyakan dari mereka mengaku bahwa paling sering mengkonsumsi ikan dan telur kalau daging masih jarang

- 3) Peningkatan pendapatan keluarga

Mengenai peningkatan pendapatan keluarga setelah terima PKH di ungkapkan oleh ibu Ratnawati yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk peningkatan keluarga sebelum kita terima PKH kan beda lagi setelah kita terima PKH yakni untuk biaya anak sekolah bisami terbantu juga”. (Ratnawati, wawancara 16 Februari 2023)

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Ratnawati yang mengatakan sangat terbantu terutama menunjang biaya pendidikan anak sekolah, hal yang sama

pula disampaikan oleh responden (KPM PKH) yaitu dengan adanya bantuan PKH menjadikan keluarga penerima manfaat mendapatkan tambahan penghasilan dari dana PKH yang di dapat. Jadi bukan lagi hanya mengharap pendapatan suami untuk menutupi biaya sehari hari. Bahkan saat melakukan penelitian di lapangan ada beberapa KPM PKH yang membuka warung kecil kecilan untuk menambah penghasilan keluarga.

- c. Perubahan pada kebutuhan pengembangan

Dalam BKKBN, keluarga dapat dikatakan sejahterah apabila dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti mulai menyisihkan uang untuk menabung yang dapat digunakan untuk biaya tak terduga di masa yang akan datang serta dapat menciptakan suasana kebersamaan dalam keluarga menjadi lebih baik.

- 1) Mulai Menyisihkan Uang Untuk Menabung

Dengan adanya bantuan PKH tentunya bisa meningkatkan pendapatan keluarga, mengenai penyisihan uang untuk menabung, Ibu Nurhani mengatakan bahwa: *“iyaa sering juga kita menabung untuk kedepannya”*.

Sejalan dengan penuturan Ibu Nurhani, para Responden KPM di Desa Lalowatu sendiri setelah menjadi KPM PKH Alhamdulillah sudah mulai meyisihkan uangnya untuk di

tabung walaupun jumlahnya tidak menentu karena uang yang ditabung merupakan sisa dari pembelian kebutuhan sehari-hari.

2) Kebersamaan Dalam keluarga lebih baik

Setelah memperoleh bantuan sosial PKH keluarga menjadi lebih dekat karena bisa membantu meringankan sedikit beban suami seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Dengan bantuan PKH ini biaya konsumsi sehari-hari bisa ditanggulangi bahkan ada juga KPM yang membuka usaha (kios) jadi ketika dana PKH cair sebagian uangnya di gunakan untuk menambah isi warung. Istri dari Bapak Adriyansyah mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah dek, karena kasian kita sudah bisa beli barang sama sama berkumpul bersama anak dan memenuhi kebutuhan rumah tangga”.

(Putri, wawancara 07 Maret 2023)

Setelah adanya beberapa perubahan kesejahteraan masyarakat di Desa Lalowatu dengan menggunakan Indikator Bkkbn Keluarga Sejahtera I (KS I), penerima manfaat setelah menerima PKH sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk biaya pendidikan. Namun juga hampir semua keluarga merasa belum siap apabila program keluarga harapan ini selesai karena mereka masih sangat membutuhkan dana tersebut untuk membantu menunjang kebutuhan sehari-hari. Seperti

yang disampaikan oleh ibu Nianti yang merasa masih layak menerima karena masih memiliki anak sekolah. Kemudian hal ini juga disampaikan oleh Ibu Jumarni yang memiliki komponen Balita dan anak sekolah, selanjutnya juga Ibu Yeni merasa masih membutuhkan dana PKH karena masih memiliki komponen anak sekolah.

Selain itu mereka juga berharap bantuan PKH terus berlanjut dan lebih diperbaiki lagi dalam melihat kondisi masyarakat secara langsung. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua kelompok PKH yang mengatakan bahwa:

“Harapannya, PKH ini terus berlanjutlah karena kita kasian masih butuh sekali dan semoga kedepannya pemerintah lebih melihat lagi masyarakatnya secara langsung karena di Lalowatu ini masih banyak yang layak menerima PKH”.

Disamping itu banyak KPM yang mengharapkan hal serupa agar PKH tetap berlanjut dan dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Adapun hasil temuan dalam penelitian ini yakni program keluarga harapan sangat membantu keluarga kategori Miskin dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari terutama dalam hal meringankan biaya pendidikan anak sekolah. Pada pelaksanaannya, pemberian bantuan sosial PKH kepada

KPM di Desa Lalowatu dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan mereka dengan terpenuhinya sandang, pangan dan papan dengan harapan dapat menjadi solusi dalam memberantas kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Daryono (dalam Elia & Nusa, 2021, p. 17) yang mengemukakan bahwa Program Keluarga harapan khususnya di Indonesia, beberapa perguruan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat telah melakukan research dan menyatakan Program bantuan sosial PKH adalah program yang diyakini mampu meningkatkan derajat pendidikan maupun kesehatan bagi rumah tangga kategori sangat miskin.

Pandangan Ekonomi Islam tentang Program Keluarga Harapan dan Kesejahteraan masyarakat

a. Pandangan Ekonomi Islam tentang Bantuan sosial PKH

Kemiskinan menjadi masalah utama yang dialami oleh hampir semua negara. Kemiskinan juga terkait dengan kesehatan, sebagai contoh banyak rumah tangga miskin tidak memiliki sanitasi layak. Individu yang tergolong miskin tidak mampu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi berada lingkungan dan sanitasi yang tidak sehat serta tidak mampu mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas. (Mahri et al., 2021, p. 44)

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan memberikan jaminan sosial program keluarga harapan/PKH kepada masyarakat miskin yang memiliki komponen Pendidikan, Kesehatan, Ibu Hamil, penyandang disabilitas berat dan Lansia agar dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT (Qs. Al-Hasyr:7) yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya: *...Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. (Qur'an kemenag RI, 2019)*

Adanya pemberian bantuan sosial seolah menjadikan masyarakat menggantungkan diri kepada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Padahal Allah SWT sangat menekankan kepada hambanya untuk tidak bergantung terhadap sesuatu dan selalu berusaha tanpa menunggu pemberian orang lain (Sohari, 2017, p. 4). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori:

Terjemahan: *“seseorang tidak memakan suatu makananpun yang lebih baik daripada dia memakan hasil usaha tangannya sendiri; dan sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s. selalu memakan hasil usaha tangannya sendiri”* (HR. Al-Bukhari).

Sabda Rasulullah diatas menekankan bahwa sebaik baik hamba adalah yang berdiri di atas usahanya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain.

Adapun pandangan ekonomi Islam mengenai kebijakan pemerintah yakni pemberian bantuan sosial program keluarga harapan menurut (Diana, 2018, pp. 97–102). Sifat pemerintah haruslah berlandaskan pada

keadilan, tanggung jawab, dan tafaful (jaminan sosial).

1) Keadilan

Pada penelitian ini, pemberian bantuan sosial PKH di Desa Lalowatu kepada KPM telah tepat sasaran, artinya semua KPM yang mendapatkan bantuan telah sesuai dengan kategori penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi perintah Allah yakni keadilan. Namun, yang menjadi tugas lanjutan bagi pemerintah adalah memastikan semua golongan masyarakat yang layak dibantu dan memenuhi kategori dapat mendapatkan hak yang sama yakni menerima bantuan. Sedangkan di Desa Lalowatu masih banyak masyarakat yang layak mendapatkan bantuan PKH tetapi justru tidak dapat. Jadi, implementasi bansos PKH di Desa Lalowatu dalam perspektif Ekonomi Islam belum dapat memenuhi nilai keadilan karena pemberian bantuan PKH belum merata ke seluruh kalangan masyarakat miskin.

2) Tanggung jawab

Pendamping PKH memiliki tanggung jawab dalam melakukan pendampingan sebagaimana dalam peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 pasal 10 ayat (1) huruf h. Dilihat dari hasil wawancara dengan seluruh KPM PKH di Desa Lalowatu, seluruh KPM mengatakan bahwa di setiap bulannya pendamping rutin melakukan pertemuan untuk melakukan sosialisasi mengenai penggunaan dana bantuan PKH.

Dalam implementasinya, pemerintah/pendamping bansos PKH di Desa Lalowatu sudah menerapkan sikap tanggung jawab secara penuh dalam mewujudkan kemaslahatan. Penerima bantuan pun ditentukan berdasarkan data data yang akurat sehingga pengimplementasian PKH sudah terealisasi dengan baik dengan adanya tanggung jawab secara penuh para

petugas/pengelola program kepada masyarakat.

3) Takaful (jaminan sosial)

Jaminan sosial dalam islam yakni *huquq Allah* yaitu sebuah kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah Swt kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta.

Dilihat dari jawaban saat melakukan wawancara dengan KPM mengenai penggunaan dana PKH sesuai kewajiban yakni pendidikan dan kesehatan maupun menabung. Rata-rata jawaban yang disampaikan oleh KPM mereka lebih memprioritaskan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan, sedangkan untuk menabung masih sebagian kecil masyarakat yang dapat menyisihkan sebagian dana bantuan untuk ditabung. Rata-rata jawaban dari KPM menggunakan dana bantuan PKH untuk keperluan kebutuhan pokok sehari-hari.

Dalam implementasinya, PKH di Desa Lalowatu jika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam yakni Takaful belum dapat dikatakan efektif karena masih banyaknya kebutuhan yang perlu dipenuhi seperti kebutuhan sehari-hari, dimana mereka mengesampingkan jaminan sosial untuk masa depan yakni menabung.

Jadi, Pada pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Lalowatu menurut pandangan Ekonomi Islam, pemerintah telah menerapkan sikap tanggung jawab, keadilan dan takaful. Walaupun masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki seperti sikap keadilan dan takaful itu sendiri. Kemudian, di sisi lain KPM merasa masih belum siap apabila program keluarga harapan dihentikan karena mereka masih sangat membutuhkan. Meskipun sudah ada beberapa KPM yang melakukan Graduasi mandiri namun untuk beberapa KPM masih

belum siap jika harus berhenti menjadi penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketergantungan KPM kepada bantuan PKH yang diberikan oleh pemerintah. Cukup sejalan dengan hasil penelitian (Aisyah, 2019, pp. 63–64) yang juga merasa bahwa pemberian bantuan sosial PKH belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bulu Cina karena rata-rata masyarakatnya tidak memiliki pekerjaan tetap, walaupun ada beberapa yang bekerja untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari namun belum bisa meningkatkan perekonomian karena kebutuhan hidup yang semakin tinggi.

b. Pandangan Ekonomi Islam tentang Kesejahteraan Masyarakat

Islam merupakan agama yang sifatnya umum, yang meyakini bahwa setiap manusia akan menemui kesuksesan di dunia maupun di akhirat nanti. Agama Islam senantiasa mengarahkan pemeluknya untuk mencapai kesejahteraan baik materil maupun spiritual. Sebagaimana dalam salah satu do'a yang cukup populer di dalam Al-Qur'an yakni QS Al-Baqarah:201 sebagai berikut:

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

Terjemahnya: *Di antara mereka ada juga yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka."* (Qur'an kemenag RI, 2019)

Kesejahteraan sosial merupakan usaha keseluruhan sosial yang terorganisir dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Adapun yang tercakup didalamnya pendapatan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial, reaksi budaya, pendidikan dan lain-lain. (Ghafur et al., 2012, p. 7)

Kesejahteraan sosial dimulai dari perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan aspek aspek aqidah dan etika pada diri, karena dari pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat seimbang. Masyarakat islam pertama lahir dari Nabi Muhammad melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Dari pribadi nabi, lahirlah keluarga-keluarga yang seimbang. Kesejahteraan yang dimulai dengan islam, adalah penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Allah. Sebab tidak mungkin jiwa akan merasakan ketenangan apabila kepribadian terpecah. Sebagai contoh nyata, kesejahteraan sosial dimulai dari kesadaran bahwa apapun keputusan Allah setelah usaha maksimal, adalah yang terbaik dan selalu mengandung hikmah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk berusaha semaksimal mungkin kemudian berserah diri kepadanya. (Notowidagdo, 2022, p. 47)

Ketidakmerataan karunia, nikmat dan sumber-sumber ekonomi kepada perorangan atau bangsa adalah kuasa Allah SWT. Agar yang diberi lebih selalu bersyukur kepada Allah SWT. Implikasi dari doktrin ini adalah bahwa antara manusia terjalin persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi. Saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan ekonomi dengan prinsip profit and loss sharing. (Ernawati & Setiyati, 2017, p. 54). Di dalam islam kita harus terus berikhtiar untuk menuju kesuksesan dengan cara berusaha dan bekerja keras. Allah SWT juga memerintahkan kita untuk senantiasa saling membantu sesama manusia. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qs Al-Hujurat:13) sebagai berikut:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya: *...Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha*

Mengetahui lagi Mahateliti.
(Qur'an kemenag RI, 2019)

Adapun indikator kesejahteraan sosial menurut imam Al-Ghazali dengan membagi prioritas/indikator kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa Lalowatu hanya dapat memenuhi kategori prioritas utama yakni ad-dharuriyat yaitu pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Sedangkan untuk prioritas kedua (hajiatialah) dan prioritas ketiga (tahsiniat) masih belum bisa di jangkau oleh KPM PKH.

Harapan masyarakat Desa Lalowatu untuk Program Bansos PKH

Saat melakukan penelitian dilapangan, peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat yang masuk dalam kategori Pra Sejahterah dan mereka rata-rata sudah sering mendengar tentang Program Keluarga Harapan dan sangat ingin menjadi anggota PKH. Menurut pengakuan dari masyarakat Lalowatu yang juga masuk dalam kategori Pra Sejahterah mereka sangat berkeinginan untuk menjadi peserta/KPM PKH sebagaimana yang di katakan oleh Ibu Lisa bahwa:

“Kita ingin sekali kasian juga dapat seperti yang lain”.

Dari semua masyarakat yang diwawancarai, mereka memiliki keinginan yang sama karena mereka juga merasa layak dibantu dan memiliki komponen seperti anak sekolah, balita dan lansia.

Saat melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat, peneliti mendapatkan beberapa informasi yakni ada beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan yakni BLT-DD yang diterima per 3 bulan sekali. Ada pula yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah padahal dari kondisi ekonominya layak untuk mendapatkan bantuan. Sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama khususnya pemerintah dalam melihat kembali mana keluarga yang lebih layak dibantu.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) yang dilaksanakan di Desa Lalowatu dilihat dari ketepatan sasaran, pemahaman program, ketetapan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata ditambah dengan adanya sosialisasi rutin dan pemantauan program sudah berjalan dengan sangat efektif. Semua indikator yang disebutkan telah terlaksana dan terpenuhi dengan baik. Hadirnya PKH ditengah-tengah masyarakat telah membawa beberapa perubahan kesejahteraan yang nyata kepada keluarga penerima manfaat PKH. Beberapa perubahan yang dirasakan oleh KPM yakni sebagai berikut:
 - 1) Perubahan konsumsi sehari-hari menjadi lebih baik.
 - 2) Meringankan biaya pendidikan anak sekolah.
 - 3) Perubahan kondisi rumah menjadi lebih layak huni.
 - 4) Perubahan dalam pembelian baju dalam satu tahun.
 - 5) Mencapai batas minimal konsumsi daging ikan/telur.
 - 6) Peningkatan pendapatan keluarga.
 - 7) Mulai menyisihkan uang untuk menabung.
 - 8) Kebersamaan di dalam keluarga lebih hangat.
2. Menurut pandangan Ekonomi Islam Pelaksanaan PKH di Desa Lalowatu telah memberikan banyak perubahan kepada beberapa KPM. Namun mereka masih belum siap dan merasa keberatan jika sewaktu-waktu program keluarga harapan diberhentikan oleh pemerintah, tentu hal tersebut masih kurang tepat karena hal ini menunjukkan masih adanya rasa ketergantungan Keluarga Penerima Manfaat dengan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah,

maka hal tersebut bertentangan dengan Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori yang mengatakan “seseorang tidak memakan suatu makananpun yang lebih baik daripada dia memakan hasil usaha tangannya sendiri; dan sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s. selalu memakan hasil usaha tangannya sendiri”. Kemudian, menurut imam Al-Ghazali dengan membagi prioritas/indikator kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa lalowatu hanya dapat memenuhi kategori prioritas utama yakni ad-dharuriyat yaitu pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Sedangkan untuk prioritas kedua (hajiatialah) yakni pemenuhan kebutuhan sekunder dan prioritas ketiga (tahsiniat) yakni pemenuhan kebutuhan untuk kesenangan dan kebutuhan pelengkap masih belum bisa di jangkau oleh KPM PKH.

6. Saran

Setelah adanya kesimpulan dari penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi pihak terkait. Adapun saran saran tersebut sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Keluarga Penerima Manfaat, hendaknya dapat menggunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan serta diharapkan dapat selalu hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh pendamping PKH setiap bulannya.
2. Diharapkan bagi pendamping PKH, lebih berinovasi dalam memberikan materi dalam pertemuan yang dilakukan agar KPM lebih tertarik dalam mendengarkan materi yang dibawakan. Serta memberikan edukasi dan arahan kepada KPM agar tidak bergantung kepada bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
3. Diharapkan untuk pemerintah, dalam penentuan KPM hendaknya menggunakan data yang valid sehingga

program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran. Serta diharapkan lebih peka terhadap masyarakat yang sangat layak dibantu.

4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya, dapat meneliti lebih luas tentang Program Bantuan sosial PKH sehingga dapat mengetahui apakah program bantuan ini memberikan pengaruh yang besar bagi penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan..

Daftar Pustaka

- Aminudin, N., Ayu, I., & Sari, P. (2015). Sistem Pendukung Keputusan (Dss) Penerima Bantuaprogram Keluarga Harapan (Pkh) Pada Desa Bangun Rejo Kec.Punduh Pidada Pesawaran Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp). *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 5(2), 66–72.
- Amelia, M. (2021). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Peserta Pkh Di Desa Pulau Betung Kecamatan Pampangan). 14–39.
- Andika, S. (2021). Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu). *Journal of Shariah and Islamic Economics*, 2(1), 44–55.
- Asyiah Siregar, N., & Ritonga, Z. (2018). Pengaruh Pendidikan Dan Pendapatan Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Sidolaju Ngawi. Nurintan Asyiah Siregar 1) Zuriani Ritonga 2) *Informatika: Jurnal Ilmiah AMIK Labuhan Batu*, 6(1).
- Bappenas. (2018). *Keluarga Berencana. Jurnal Keperawatan*, 1.
- Domri, D., Ridwan, R., & Jaya, M. (N.D.). *Evektivitas Program Keluarga*

- Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 1–16.
- Effendi, S. (2019). Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 147–158.
- Ekardo, A., Firdaus, & Elfemi, N. (2014). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial*, III.
- Ernawati, & Setiyati, R. (2017). Wawasan Qur'an Tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-Quran). *Jurnal Ekonomi*, 8.
- Elia, F. A., & Nusa, Y. (2021). Analisis efektivitas program keluarga harapan (pkh) dalam upaya pengentasan kemiskinan di kampung nawaripi distrik wania kabupaten mimika. 5(April), 15–42.
- Hasan, N. F. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan (Studi Kasus Pada Siswa Peserta Pip Dari Keluarga Peserta Pkh Di Sdn Jogosatru Sidoarjo). *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(1), 1–18.
- Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(01), 61–72.
<https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762>
- Kholis, N. (2015). Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Akademika*, 20(02), 244–260.
- Kurniawan, A. (2020). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Selotong Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. In *Journal of Chemical Information and Modeling*. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10530>
- Kuswarno, E. (2006). Tradisi Fenomenologi pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, [Http://Journal.Unpad.Ac.Id/Sosiohumaniora/Article/View/5384/2746](http://Journal.Unpad.Ac.Id/Sosiohumaniora/Article/View/5384/2746), 07(1), 47–58.
<http://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5384/2746>
- Luthfi, M. (2019). Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kbb). *COMM-EDU*, 2(1), 81–89.
- Mudiarta, K. G. (2011). Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Perspective and Role of Economic Sociology in Economic Development. 55–66.
- Mufidah, N. (2021). Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Dikelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Sosial Dan Sains (Sosains)*, 1(2), 82–92.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67.
<https://doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069>
- Pratiwi, I. P., Ferdinandus, F., & Limantara, A. D. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *Jurnal Teknik Informatika, Sistem Informasi, Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 182–195.
- Prichatin, A. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam

- Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. IAIN Purwokerto, 4(1), 1–7.
- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam.
- Rahmah Muin, R. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 5(2), 130–147.
- Rahman, M., Mahfudz, Toar, A., & B, J. (2022). Peran PT. Jhonlin Batu Mandiri Dalam Menigkatkankat Ekonomi dan Kesjahteraan Masyarakat Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. *Research Business and Economics Studies*, 3(1), 39–43.
- Rahman, M., & Mongkito, A. W. (2021). SEKITAR PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus PT . Jhonlin Batu Mandiri). 8, 266–270.
- Ras, A. (2013). Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. *Socius*, XIV, 56–63.
- Riyanti, S. (2019). Implementasi dan efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di tinjau dari perspektif ekonomi islam (studi kasus pada peserta PKH Kecamatan Pekalongan Barat). *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Sohari. (2017). Etos Kerja Dalam Perspektif Islam.
- Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia*, 11(2), 173–179.
- Suhardin, Y. (2007). Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Hukum Pro Justitia*, 25(3).
- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 88. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14213>
- Utomo, D., Hakim, A., & Ribawanto, H. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1), 29–34. https://www.academia.edu/download/48480932/333-2287-1-PB_1.pdf
- Wahab, A. (2020). Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Masharif Al-Syariah*, 5(1), 101–113.
- Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 28(1), 35–50. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.376>
- Wulandari, F., Yamardi, Y., & Rohayatin, T. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Caraka Prabhu*, 4(1), 31–46. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.206>
- Zakiyah, N., OKtavia, L., Khairiyah, F., & Ilman, M. A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 97. <https://doi.org/10.20961/sp.v15i2.43501>